

Determinan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi

Rido Afriyan Firmanda*; Siti Hodijah; Yohanes Vyn Amzar

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*E- mail korespodensi : rido.firnanda55@gmail.com

Abstract

Regional financial independence is a condition where the process of financing the implementation of a regional government is carried out independently using original regional income. This research aims to see and analyze the influence of capital expenditure, general allocation funds and special allocation funds on regional financial independence in Jambi Province in 2010-2021. The data used is secondary data with time series during the period 2010-2021. And the analysis method used is the Panel Data Regression Method. The research results show that at the f test (simultaneous), we can conclude that simultaneously the variables Capital Expenditure, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have an effect on regional financial independence in Jambi Province. Viewed using the t test (partial), we can conclude that the capital expenditure variable has a negative and significant effect on regional financial independence and the general allocation fund has a positive and insignificant effect on regional financial independence, while the special allocation fund variable has a positive and significant effect on regional financial independence.

Keywords: *capital expenditure, general allocation funds, special allocation funds, original regional income, regional financial independence*

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah ialah satu kondisi dimana pada proses pembiayaan pelaksanaan pemerintah suatu daerah dilaksanakan secara mandiri yang menggunakan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pengaruh belanja modal, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2010-2021. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan runtut waktu (time series) selama periode 2010- 2021. Dan metode analisis yang digunakan ialah Metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara Uji f (Simultan) dapat kita simpulkan bahwa secara simultan variabel Belanja Modal, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi. Dilihat secara Uji t (Parsial) dapat kita simpulkan bahwa variabel Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel Dana Alokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci : *belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi berarti pengaturan diri, mengurus atau mengendalikan diri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 5 Ayat 32 Tahun 2004, disebutkan bahwasanya otonomi daerah mengacu pada kebebasan, kekuasaan, dan keharusan daerah otonom untuk

mengatur dan menangani masalah negara serta kebutuhan masyarakat daerah yang diatur undang-undang. Sementara itu, daerah otonom ialah kesatuan masyarakat hukum yang telah menetapkan batasan wilayah dan memiliki kekuasaan untuk menangani hal-hal terkait kebutuhan masyarakat lokal menurut usaha-usaha nonpemerintah dalam hubungan kemasyarakatan. Bagian penting dari otonomi daerah yakni memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengendalian pemerintahan kota dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya dan pelayanan prima kepada masyarakat (Widjaja, 2002)

Otonomi daerah dicanangkan di Provinsi Jambi, namun belum maksimal. Maka dari itu, pemerintah daerah kabupaten Jambi harus mengembangkan serta mengelola perekonomian daerahnya. Otonomi daerah dapat berjalan efektif apabila daerah mengetahui kebutuhan daerahnya sendiri. Pelaksanaan dan pengembangannya diawasi dan dikendalikan oleh administrasi negara. Selain itu, daerah dapat mengatur dan membiayai kegiatannya sendiri dengan bantuan sumber pendapatan atau pendapatan daerah yang jelas dan terkelola dengan baik

Siasat keuangan yang sesuai dengan hakikat keadilan sangat diperlukan untuk menunjang sumber keuangan pembangunan daerah, hal ini wajib dimaksimalkan, efisiensi, serta efektivitas peningkatan pendapatan daerah. Mengenai kebijakan fiskal, Khusaini (2006) menyatakan bahwasanya pajak dan retribusi ialah sumber pendapatan daerah yang krusial untuk memodali pengelolaan pemerintahan dan pengembangan guna mewujudkan otonomi daerah sejati, penuh semangat dan tenaga, harmonis, serta konsisten. Pembiayaan administrasi publik harus dilakukan secara efisien dan efektif, dan pembiayaan administrasi publik harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengelolaan pemerintahan selaku otoritas daerah dimodali oleh APBD, sementara itu pengelolaan kekuasaan negara selaku tanggungan negara dimodali oleh APBN.

Implementasi otonomi daerah yang disusun pada Undang-Undang (UU) Nomor. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah serta UU Nomor.33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Negara mendorong pemerintah daerah agar mencapai kemandirian keuangan tingkat tinggi, dengan maksud dana akan dialokasikan untuk membantu mengurangi kebergantungan pemerintahan daerah pada negara dalam pemerataan keuangan (Suryani, 2019).

Otonomi daerah juga bertujuan untuk mewujudkan independensi, mendelegasikan kekuasaan dan memetakan kemampuan sumber daya pemerintah daerah supaya stabil menurut finansial. Tingginya kemandirian ekonomi daerah tidak memiliki arti pemerintah daerah tidak wajib mendapatkan dana perimbangan, sebab dana perimbangan senantiasa dibutuhkan dalam percepatan pembangunan daerah. Kemandirian ekonomi daerah yang baik memaksimalkan kualitas layanan publik, memaksimalkan pendanaan dalam pembangunan berjangka panjang, dll (Suryani, 2019)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diharapkan mampu memetakan sumber daya keuangan secara optimal, mengelola dananya sendiri dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan negara sedemikian rupa sehingga kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota menjadi mungkin. Dengan munculnya kemandirian ekonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal ini menentukan kemandirian ekonomi daerah (Amalia, 2014). PAD menjadi satu diantara berbagai sumber penghasilan yang pertumbuhannya harus selalu berkesinambungan. Besaran dan peningkatan pembayaran PAD kabupaten/kota berperan sangat penting dalam meningkatkan otonomi kabupaten/kota agar tidak senantiasa bergantung pada dukungan pemerintah. (Kusuma, 2020). Data PAD Di Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Jambi

dalam tahun 2017 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	85.760.000.000	80.481.000.000	85.903.000.000	85.905.046.225	81.737.000.000
2.	Merangin	86.702.000.000	89.304.000.000	106.160.000.000	100.411.721.874	111.262.174.504
3.	Sarolangun	85.185.129.614	118.828.593.872	94.621.365.980	70.098.806.982	121.162.901.000
4.	Batanghari	87.188.800.949	112.000.000.000	18.378.406.722	157.490.667.436	148.444.860.321
5.	Muaro Jambi	77.926.789.369	90.305.498.363	93.794.601.240	92.797.887.531	80.017.173.000
6.	Tanjung Barat	76.775.700.726	49.607.102.060	53.919.302.033	49.646.511.513	42.709.243.000
7.	Tanjung Timur	83.011.000.000	90.348.000.000	85.000.000.000	100.284.726.000	100.284.726.000
8.	Tebo	68.406.126.028	76.160.028.618	842.319.738.000	756.063.831.000	748.172.145.000
9.	Bungo	183.133.000.000	133.848.000.000	140.327.000.000	137.656.958.000	151.297.834.000
10.	Kota Jambi	397.327.000.000	338.891.000.000	393.429.000.000	364.142.193.000	535.183.487.000
11.	Kota Sungai Penuh	31.420.979.313	34.184.049.669	34.900.741.628	29.050.525.938	47.073.181.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Ditinjau dari Tabel tersebut bisa diketahui bahwasanya data PAD di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jambi mengalami fluktuatif atau cenderung tidak stabil di setiap tahunnya. Ketidakstabilan ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Dimana diharapkan PAD mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ialah satu kondisi dimana pada proses pembiayaan pelaksanaan pemerintah suatu daerah dilaksanakan secara mandiri yang menggunakan pendapatan asli daerah. Kemandirian finansial suatu daerah untuk mencukupi semua keperluan belanja modal (Oki, 2020). Kemandirian ekonomi daerah kategori pemerintah daerah menyatakan bahwasanya kemandirian daerah yang berada pada tingkat sangat rendah bisa menunjukkan bahwasanya negara berperan dominan dalam pemerintahan daerah. Tingkat kemandirian yang rendah memiliki arti intervensi negara mulai mengalami pengurangan sebab daerah dinilai sedikit lebih sanggup melakukan otonomi daerah. Tingkat menengah mengrepresentasikan suatu daerah yang hampir sanggup melakukan otonomi daerah, sementara itu tingkat tinggi berarti bahwasanya pemerintah daerah sanggup mengelola masalah otonomi daerah secara mandiri (Suryani, 2019).

Dengan diberikannya otonomi, daerah terpaksa memilih pengganti sumber pembiayaan pengembangan tanpa melemahkan harapannya akan bantuan negara. Menurut sumber penghasilan daerah ataupun keuangan untuk pembangunan daerah, yakni PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah serta penghasilan wajib lainnya, sebagai halnya ditetapkan pada UU Keuangan Daerah No. 33 Tahun 2004 (Oki, 2020).

Kemandirian ekonomi daerah tercermin dari tingkat PAD yang diterima daerah. Mengenai pembagian otonomi daerah yang lebih banyak pada daerah, PAD senantiasa menjadi satu diantara berbagai parameter untuk menimbang tingkat kebergantungan daerah terhadap penyelenggaraan negara, sebab hanya menjadi sumber pendapatan daerah. Pada dasarnya, semakin besar porsi PAD dalam APBD, semakin rendah kebergantungan daerah akan negara. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari perolehan PAD akan total penerimaan daerah (TPD). Seiring dengan meningkatnya kuantitas PAD di daerah, kemandirian mereka juga ikut mengalami

peningkatan (Saputra, 2015).

PAD ialah satu diantara banyaknya parameter pengukur kemandirian suatu daerah dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Rasio Kemandirian Ekonomi Daerah merupakan rasio yang menyatakan kesanggupan masyarakat dalam memodali penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan, dan layanan pada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Dewi, 2014). Kemandirian ekonomi daerah tercermin dari tingkat PAD dipadankan dengan pendapatan daerah dari sumber lain contohnya hibah atau pinjaman pemerintah. Pada riset yang lebih dahulu, Erawati & Suzan (2015) membuktikan bahwasanya PAD memiliki pengaruh positif akan tingkat kemandirian ekonomi daerah.

Salah satu aspek yang memberikan pengaruh pada kemandirian ekonomi daerah antara lain belanja modal di daerah. Data belanja modal Provinsi Jambi periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Belanja Modal di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	218.905.000.000	191.868.000.000	293.806.000.000	159.734.293.273	226.594.369.000
2.	Merangin	301.758.000.000	207.241.000.000	226.728.000.000	122.295.189.000	156.097.436.902
3.	Sarolangun	247.349.222.340	215.169.006.764	414.970.363.981	247.728.875.511	298.038.773.000
4.	Batanghari	186.017.640.200	160.771.763.866	195.733.209.308	249.913.107.136	177.304.084.037
5.	Muaro Jambi	368.236.697.926	292.728.025.310	332.194.053.216	262.778.498.437	391.582.517.000
6.	Tanjung Barat	275.104.187.921	312.956.653.764	312.956.653.764	229.225.479.693	155.212.766.000
7.	Tanjung Timur	418.013.000.000	419.657.000.000	697.230.000.000	390.378.974.000	228.354.538.000
8.	Tebo	247.728.875.511	258.990.826.317	269.003.691.375	139.855.988.043	103.676.777.000
9.	Bungo	156.057.013.000	203.211.013.000	234.629.013.000	294.680.574.000	513.269.911.000
10.	Kota Jambi	419.316.000.000	445.809.000.000	432.100.000.000	667.715.470.000	473.287.429.000
11.	Kota Sungai Penuh	173.331.166.028	194.683.207.114	176.535.574.208	134.644.309.515	812.837.378.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Apabila meninjau informasi dari tabel di atas, terlihat bahwasanya penanaman modal di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi tidak merata atau datanya tidak stabil dan kecenderungan naik atau turun tidak selalu terlihat. Hal ini terbukti berdampak pada bagaimana kemandirian ekonomi daerah dihasilkan dari tata kelola ekonomi kabupaten/kota yang tidak stabil. Kemandirian ekonomi daerah berarti kemampuan daerah terkait mengendalikan perekonomiannya yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pada gilirannya merepresentasikan kesanggupan daerah dalam mengendalikan perekonomiannya selaku bagian dari pemerintahan (Periansya, 2019). Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum

Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah dengan kesanggupan relatif tinggi lebih kecil, dan berbeda halnya dengan daerah dengan kesanggupan ekonomi relatif rendah menerima DAU relatif besar. Dapat disimpulkan bahwasanya, ketika pemerintah pusat mendistribusikan DAU yang relatif besar, daerah kurang otonom. Bisa jadi dikarenakan PAD daerah kecil dan negara harus mengalokasikan dana ke daerah. Rincian

DAU Provinsi Jambi tahun 2017-2021 ialah sebagai berikut:

Tabel 3. Dana Alokasi Umum di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	506.067.000.000	589.202.611.000	627.388.776.000	608.252.582.000	616.634.834.000
2.	Merangin	601.797.000.000	718.849.295.000	612.248.352.000	594.720.491.000	631.461.751.000
3.	Sarolangun	584.152.378.000	583.153.387.000	599.555.685.000	536.952.715.000	736.195.365.000
4.	Batanghari	611.107.019.000	605.739.426.000	627.388.776.000	658.758.214.799	559.821.528.000
5.	Muaro Jambi	670.341.091.000	642.734.752.000	669.024.250.000	412.574.295.000	629.162.056.000
6.	Tanjung Barat	421.529.000.000	506.589.288.000	536.177.694.000	519.462.967.000	518.312.842.000
7.	Tanjung Timur	533.204.953.000	540.400.531.000	564.422.212.000	521.920.298.000	530.592.185.000
8.	Tebo	582.313.317.000	582.313.417.000	598.297.279.000	534.449.531.000	546.836.312.000
9.	Bungo	537.682.000.000	635.999.293.000	656.106.480.000	639.582.591.000	629.534.592.000
10.	Kota Jambi	727.564.344.000	714.783.378.000	757.404.051.000	728.594.386.000	792.562.373.000
11.	Kota Sungai Penuh	419.516.054.000	422.532.652.000	447.899.516.000	412.574.295.000	441.417.481.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Apabila meninjau informasi pada tabel tersebut, bisa diamati bahwasanya DAU didistribusikan pada setiap daerah/kota di Provinsi Jambi masih tergolong banyak. Dana umum yang dialokasikan negara untuk daerah dinilai besar, sehingga daerah dianggap kurang mandiri sebab daerah masih menerima pendapatan utamanya dari uang negara. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu: 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah; dan 4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah (Halim, 2016).

Pengelolaan ekonomi daerah tidak hanya memerlukan SDM yang kompeten, namun juga perlu mendapatkan dukungan dari kemandirian ekonomi daerah yang memadai. Kemandirian ekonomi daerah, antara lain tercermin dalam PAD yang menjadi sumber pokok terwujudnya otonomi daerah. Tiap-tiap wilayah berupaya senantiasa mengoptimalkan potensi masing-masing daerah agar PAD dapat berkembang. Kemandirian ekonomi wilayah pertambangan PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah (Periansya, 2019).

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tujuan untuk membiayai kegiatan tertentu yang diprioritaskan secara regional dan nasional, bisa dikatakan bahwasanya pendapatan asli daerah masih rendah, dan juga perlu mengembangkan diri guna mengembangkan daerahnya. Apabila DAK yang diberikan oleh negara relatif besar, dapat dinilai bahwasanya daerah itu belum mandiri secara finansial. Semakin tinggi transfer DAK dari negara lantas semakin rendah tingkat mandiri daerah dalam hal finansial, dan sebaliknya bertambah rendah transfer DAK dari negara, lantas semakin tinggi tingkat mandiri daerah dalam hal finansial.

Jika DAK yang diberikan kepada daerah negara relatif besar, maka daerah tersebut dianggap kurang memiliki otonomi, sebab daerah tetap mengambil pendapatan utamanya dari dana negara. Dana khusus dialokasikan ke daerah khusus untuk membiayai tindakan tertentu yang menjadi bagian dari agenda prioritas nasional yang menangani masalah

daerah dan membantu daerah membiayai keperluan fisik fasilitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perkapalan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah dan lingkungan. Tujuan dibentuknya DAK untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Kecilnya realisasi DAK yang diterima disebabkan karena tidak banyak kegiatan atau program pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota (Halim, 2016). Data DAK Dalam Provinsi Jambi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Dana alokasi khusus di Kabupaten /Kota dalam Provinsi Jambi (Rupiah)

No	Kabupaten	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kerinci	252.692.000.000	50.616.000.000	67.201.559.000	83.591.536.000	94.516.534.000
2.	Merangin	292.701.000.000	79.417.000.000	80.086.336.000	101.583.662.000	93.263.293.000
3.	Sarolangun	138.979.000.000	53.706.000.000	100.422.068.000	115.482.231.000	103.482.742.000
4.	Batanghari	150.495.219.000	15.943.284.000	18.087.325.267	178.183.186.000	111.890.860.321
5.	Muaro Jambi	40.522.000.000	59.177.000.000	92.599.539.000	172.222.782.000	172.222.782.000
6.	Tanjung Jabung Barat	94.909.000.000	84.204.000.000	65.482.899.000	79.562.733.000	85.462.934.000
7.	Tanjung Jabung Timur	69.929.000.000	38.584.000.000	44.628.721.000	68.255.956.000	74.582.734.000
8.	Tebo	164.975.000.000	76.160.028.618	598.297.279.000	179.513.733.000	110.619.705.000
9.	Bungo	206.891.000.000	38.167.000.000	44.628.721.000	56.482.583.000	59.542.293.000
10.	Kota Jambi	333.922.000.000	10.064.000.000	121.178.698.000	172.222.782.000	142.842.472.000
11.	Kota Sungai Penuh	216.031.000.000	36.146.000.000	62.743.310.000	95.489.171.000	98.723.631.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Dari Tabel 4 terlihat bahwa perkembangan dana alokasi khusus pada setiap Kabupaten/Kota disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih kurang memiliki otonomi, sebab daerah tetap mengambil pendapatan utamanya dari dana negara. Besar kecilnya suatu daerah memperoleh pembayaran pajak dan retribusi oleh warga masyarakat berakibat pada kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai ke pemerintahannya sendiri, misalnya pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

METODE

Jenis riset yang diimplementasikan pada riset ini ialah penelitian kuantitatif yang merupakan jenis riset yang memiliki spesifikasi terorganisasi, terjadwal, dan tersusun secara gamblang sejak awal sampai perumusan rencana penelitian. Metode penelitian kuantitatif dipergunakan dalam mempelajari populasi atau sampel khusus, seperti yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2019), yakni metode penelitian yang sesuai dengan filosofi positivisme, instrumen penelitian dipergunakan dalam pengumpulan data, menganalisis data memiliki sifat kuantitatif/statistik, tujuan diantaranya untuk pengujian hipotesis

Data yang dipergunakan dalam riset yang dilakukan ialah data panel time series 11 tahun dari tahun 2010 hingga 2021. Dalam riset yang dilakukan, data sekunder terkait variabel PAD, belanja modal, DAU dan DAK didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. Kemudian, data kemandirian

ekonomi daerah dihitung dengan mengimplementasikan rumus kemandirian ekonomi daerah. Data yang dipergunakan pada riset ini merupakan data dari tahun 2010-2021. Untuk menganalisis permasalahan pertama diadopsi model dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah formulasi perhitungan berikut (Mardiasmo, 2002):

$$RK = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Regresi linier data panel

Untuk menganalisis permasalahan kedua diadopsi model dengan menghitung menggunakan model analisis regresi linier data panel. Formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$y_{it} = \alpha + a_i + X'_{it}\beta_1 + \varepsilon_{it}\dots\dots\dots(2)$$

$$KKD_{it} = \alpha + \beta_1 BM_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}\dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

KKD_{it} = Kemandirian keuangan daerah

α = Konstanta

β = Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

BM_{it} = Belanja modal

DAU_{it} = Dana alokasi umum

DAK_{it} = Dana alokasi khusus

α_i = Efek individu yang berbeda-beda untuk setiap individu ke-i

ε_{it} = Error regresi seperti halnya pada model regresi klasik.

Perumusan dan pengujian hipotesis

Uji t (parsial)

Uji t bertujuan untuk mengamati apakah setiap variabel bebas (X) memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial (Sugiyono, 2019). Proses ini dimulai dengan menentukan taraf signifikansi, yang dalam penelitian ini menggunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Selanjutnya, kriteria keputusan ditetapkan: jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 dan nilai t hitung > t tabel, maka tidak ada dampak yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sebaliknya, jika nilai signifikansi (sig) < 0,05 dan nilai t hitung < t tabel, maka terdapat dampak yang signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Rumus uji t adalah:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}\dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

X_1 = Nilai rata – rata pada kumpulan data pertama

X_2 = Nilai rata – rata dari kumpulan data kedua

n_1 = Jumlah data pada kumpulan data pertama

n_2 = Jumlah data pada kumpulan data kedua

S = Standar Deviasi atau variansi

Uji F (simultan)

Jika ingin mengetahui apakah variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen secara simultan, dapat menggunakan Uji-F. Percobaan ini menunjukkan efek gabungan dari semua variabel independen akan variabel dependen. Nilai yang dipergunakan ialah 0,5 atau 5% jika nilai signifikan $F < 0,05$ bisa disimpulkan

bahwasanya variabel bebas memberikan pengaruh pada variabel terikat secara simultan, atau kebalikannya. Uji F secara simultan (simultaneous test) dipergunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya dampak secara serentak atau serempak antara variabel bebas akan variabel terikat.

Rumus uji F ialah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(n-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independent

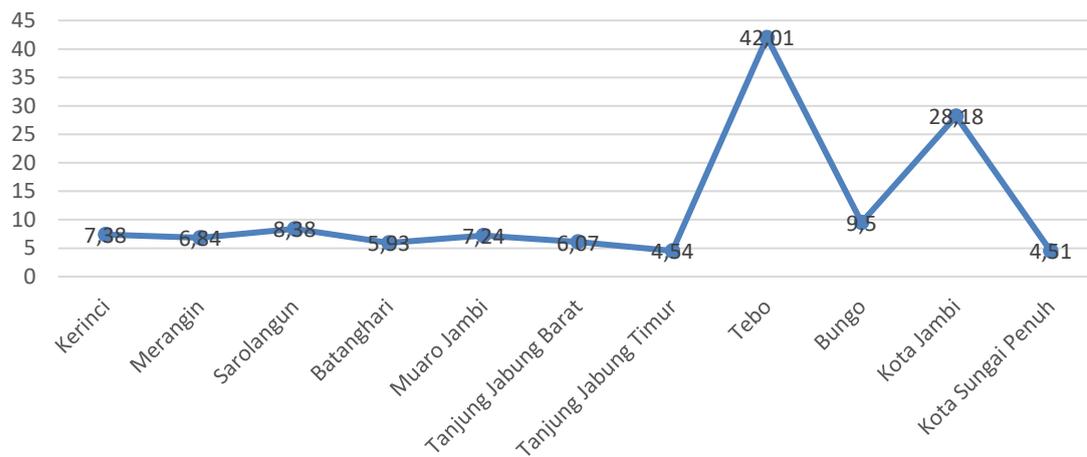
Uji koefisien determinasi (R^2)

Mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen dapat menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Tetapi uji ini mengandung kelemahan, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Maka penelitian ini menggunakan adjusted R^2 dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode 2010-2021 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata sebesar 11,87%, berdasarkan kriteria rasio kemandirian keuangan daerah yang dikemukakan (Krisniawati, 2021) mengklasifikasikan daerah dengan nilai rasio 0-25% dinyatakan memiliki tingkat kemandirian sangat rendah, maka dari itu dinyatakan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2021 memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Selanjutnya daerah Kabupaten/Kota yang memiliki rerata rasio kemandirian keuangan tertinggi adalah Kabupaten Tebo sebesar 42,01%, disusul oleh Kota Jambi sebesar 28,18%, disusul Kabupaten Bungo 9,50%, dan Kabupaten Sarolangun sebesar 8,38% sedangkan Kota Sungai Penuh menjadi daerah yang memiliki rerata rasio kemandirian keuangan daerah terendah sebesar 4,51%. Maka untuk melihat bagaimana perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah pemekaran pada Gambar 1.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Tjahjono (2016), menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada hampir keseluruhan pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.



Gambar 1. Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi, 2010-2021

Berdasarkan Gambar 1 terlihat rerata perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah pada daerah Kabupaten/Kota di tiap tahunnya selama 12 tahun periode. Terlihat adanya penurunan dan peningkatan yang tidak signifikan terlihat dari tahun 2020 hingga 2021 yang berada pada rata-rata rasion mencapai 11,87%. kategori rasio tersebut masih dikategorikan kepada kemandirian perekonomian yang Rendah Sekali. Terdapat upaya menjaga tingkat kestabilan kemandirian keuangan daerah untuk tetap meningkat secara perlahan meskipun tetap dalam kategori kemandirian yang sangat rendah. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan ini sebagai akibat dari terjadinya penurunan PAD yang diterima daerah dan peningkatan transfer dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun tersebut.

Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah yakin dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Namun, dari penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dengan nilai yang masih rendah, menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi kurang yakin dapat menggali potensi daerah, sehingga PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak besar. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah kurang berani dalam menetapkan penerimaan pajak yang tinggi dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak yakin pajak yang diterima oleh daerahnya dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD, sehingga PAD yang dianggarkan rendah.

Pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa olah data model *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa Belanja Modal (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi tahun 2010-2021, hal ini sejalan dengan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan Nugroho dan Antari (2018), yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar -2,36 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,036 yang artinya probabilitas < tingkata (0,05). Kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi periode 2010-2021 belum

sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit.

Faktor lain yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan olah data model *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Yang dimana dana alokasi umum merupakan suatu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dari APBN yang ditujukan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dikarenakan pendapatan asli daerah belum memumpuni kegiatan pembangunan daerahnya. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah namun tidak signifikan. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar 3.11 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,76 yang artinya probabilitas > tingkat (0,05).

Dimana semakin besar DAU dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian keuangan semakin rendah. Penggunaan dana transfer DAU yang efektif dan efisien untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah daerah. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal. Perolehan pendapatan daerah yang semakin besar, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Ikasari (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan olah data model *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi khusus (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Berdasarkan penjelasan diatas, diduga bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada nilai koefisien sebesar 5,78 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,00 yang artinya probabilitas > tingkat (0,05).

Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana

pemerintah daerah serta lingkungan hidup. Ikasari (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Regresi data panel

Hasil estimasi model terbaik

Model terpilih dari pengujian uji chow dan uji hausman terpilih hasil estimasi terbaik adalah metode *Fixed Effect Model* yang akan menganalisis pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi. Berikut hasil estimasi FEM.

Tabel 5. Hasil regresi dengan *fixed effect model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.03053	6.277235	1.757228	0.0819
X1?	-2.36E-11	1.11E-11	-2.114920	0.0369
X2?	3.11E-12	1.04E-11	0.299020	0.7655
X3?	5.78E-11	1.21E-11	4.782031	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
BNG--C	-3.011854			
BTH--C	-9.491650			
KRC--C	-6.479463			
KSP--C	-4.364619			
KTJ--C	16.54101			
MJI--C	-2.519687			
MRN--C	-6.512548			
SRN--C	-3.971633			
TBO--C	21.43136			
TJB--C	-0.208033			
TJT--C	-6.806737			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.707968	Mean dependent var		12.65679
Adjusted R-squared	0.670380	S.D. dependent var		15.19778
S.E. of regression	8.725430	Akaike info criterion		7.284027
Sum squared resid	7689.446	Schwarz criterion		7.618193
Log likelihood	-404.8316	Hannan-Quinn criter		7.419663
F-statistic	18.83483	Durbin-Watson stat		1.166098
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2023

Konstanta α sebesar 11.03053 menyatakan bahwa jika variabel X konstan, maka variabel kemandirian keuangan daerah adalah 11.03053. Koefisien regresi belanja modal sebesar -2,36 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel belanja modal sebesar 1% akan meningkatkan variabel kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi sebesar -2,36 dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan.

Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 3,11 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel dana alokasi umum sebesar 1% akan meningkatkan variabel kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi sebesar 3,11 dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan.

Koefisien regresi dana alokasi khusus sebesar 5,78 menyatakan bahwa setiap penambahan variabel dana alokasi khusus sebesar 1% akan meningkatkan variabel kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi sebesar 5,78 dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan.

Hasil estimasi koefisien model FEM

Hasil estimasi dari pengolahan *Fixed Effect Model* diketahui bahwa tiap tiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masing-masing mempunyai nilai kemandirian yang berbeda. Nilai kemandirian keuangan ini menjelaskan berapa besar pengaruh yang diterima oleh variabel dependent apabila pada variabel independent terjadi perubahan antar individu (wilayah) maupun waktu.

Tabel 6. Nilai Intersep Rasio Kemandirian Keuangan

Kabupaten/ Kota	Model
Kerinci	4.546 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Merangin	4.52 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Sarolangun	7.06 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Batanghari	1.54 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Muaro Jambi	8.52 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Tanjung Jabung Barat	10.83 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Tanjung Jabung Timur	4.23 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Tebo	32.46 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Bungo	8.02 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Kota Jambi	27.57 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK
Kota Sungai Penuh	6.67 KK -2.36 BJM+3.11 DAU+5.78 DAK

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 terlihat variasi intersep pada tiap tiap daerah kabupaten.kota di Provinsi Jambi yang memperlihatkan besarnya pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi. Diketahui bahwa kabupaten Tebo dan Kabupaten Kota Jambi tidak mengalami penurunan nilai intersep yang surplus, artinya menyatakan bahwa belanja modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) akan berdampak pada surplusnya alokasi anggaran untuk kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi (Y).

Uji t (parsial)

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5 menguji didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Hipotesis pertama (H₁) pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi nilai signifikansi $0,0369 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar -2.114920. Hal ini berarti belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi, sehingga hipotesis (H1) yang diajukan peneliti diterima. Hipotesis ketiga (H₂) pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi menghasilkan nilai signifikansi $0,7655 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 0,299020. Hal ini berarti dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi, sehingga hipotesis (H₂) yang diajukan peneliti ditolak. Hipotesis keempat (H₃) pengaruh dana

alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi menghasilkan nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 4,782031. Hal ini berarti dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi, sehingga hipotesis (H_3) yang diajukan peneliti diterima.

Uji F (simultan)

Dari hasil tabel 1 Uji hipotesis simultan (uji F) didapatkan nilai F hitung sebesar 18,83483 lebih besar dari F tabel 2,67 dan nilai signifikan $0,000000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan variable belanja modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi (Y).

Koefisien determinasi (adjusted R^2) dan koefisien korelasi (R)

Dari tabel 1 Dapat disimpulkan bahwa nilai *adjuster R²* pada penelitian ini sebesar 0,6703 atau 67,03%. Hal ini berarti bahwa kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variable belanja modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) sebesar 67,03% atau dengan kata lain kontribusi variable bebas terhadap variable terikat mencapai 67,03 sedangkan 32,97% merupakan kontribusi variable lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Implikasi hasil penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri, yang dimana pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan hak untuk mengelola potensinya sendiri. Yang dimana Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pra sarana masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa secara simultan variable belanja modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan dana alokasi khusus (X3) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi (Y). maka pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi untuk menjadi daerah yang mandiri. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih lemah, namun harus diimbangi dengan pengembangan potensi daerah yang di kelola oleh masyarakat daerah itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi rata-rata sebesar 11,87%, berdasarkan kriteria rasio kemandirian keuangan daerah pada tingkat kemandirian rendah sekali. Selanjutnya daerah Kabupaten/Kota yang memiliki rerata rasio kemandirian keuangan tertinggi adalah Kabupaten Tebo sebesar 42,01%, disusul oleh Kota Jambi sebesar 28,18%, disusul Kabupaten Bungo 9,50% dan Kabupaten Sarolangun sebesar 8,38%, sedangkan Kota Sungai Penuh menjadi daerah yang memiliki rerata rasio kemandirian keuangan daerah terendah sebesar 4,51%.

Dilihat secara Uji f (Simultan) dapat kita simpulkan bahwa secara simultan variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi (Y). Dilihat secara Uji t (Parsial) dapat kita simpulkan bahwa variabel Belanja modal (X1) berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan Dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel Dana Alokasi khusus (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Saran

Pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk lebih optimal dalam usaha menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerah guna meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dan mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.

Guna perluasan penelitian baik terkait kinerja keuangan daerah dan daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya untuk dapat memasukkan variabel lain yang belum terdapat dalam penelitian ini.

Pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi perekonomian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai sumber PAD, karena dengan menggali potensi ekonomi akan membuat Provinsi Jambi menjadi daerah yang mandiri dalam keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, A. B. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada daerah-daerah tertinggal di Indonesia dalam strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2021). *Jurnal Ekonomi*, 38–46.
- Amalia, A. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 364–369.
- Arifin, A. P. (2010). *Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Eka Pradana Mahardika, & Fauzan. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Fitriani, E. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota se-Jawa Barat periode 2016-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi sektor keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. (2006). Kemandirian daerah: Sebuah perspektif dengan metode path analysis. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, 12(4).

- Halim, A. (2001). *Bunga rampai: Manajemen keuangan daerah* (Edisi Pertama). Jakarta: Indra Tama.
- Indra Tama, A., & Pujihastuti, I. (2022). Determinan kemandirian keuangan pada Pemda tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *Equity*, 24(2), 261–276. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.365>
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang: BPFE Unbraw.
- Lestari, et al. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Universitas Halu Oleo, Kendari*, 1, 44–55.
- Misra Sarumaha, & Annisa, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2), 98–111. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.199>
- Nindita, N. L. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), serta belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. *JAF: Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v2i1.2098>
- Nur Indah Fitriyani, E., Endro Suwarno, A., & Muhammadiyah Surakarta, U. (2021). Pengaruh PAD, DAU, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper*, 1(1), 61–69. <https://www.djpk.depkeu.go.id>
- Patasik, C., Junaidi, & Ukkas, I. (2018). Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal (Studi pada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 112–230.
- Paminto, A. (2018). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi*, 13(2).
- Periansya, P. (1970). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(2), 165–180. <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i2.4911>
- Prapat, E. P., Hutagalung, D., & Malau, E. I. (2021). Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Pematangsiantar. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Rahmadi, S. ., Hastuti, D., & Parmadi, P. (2022). Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 213-234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.15726>
- Sari, P. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Studi kasus pada kabupaten/kota di DIY periode 2007-2014). *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Sari, P. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Global Journal*, 1(1), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i1.1382>
- Saputra, B., & Amzar, Y. V. (2015). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah

- terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Eko-Regional*, 10(2).
- Suryani, I. (2019). Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2).
- Saidi, D. M. (2014). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach* (7th ed.). United States: Wiley.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan negara pada BUMN dalam perspektif ilmu hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sulaiman, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika*, 7(2).
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).
- Tjahjono, A. (2016). Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*, 24(1).
- Ulandari, N. A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan dan kesejahteraan daerah kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).
- Usman. (2008). *Mekanisme dan penggunaan dana alokasi khusus (DAK)*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Verawaty, F., Sari, F. S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Mibia*, 16(1), 1–10.
- Widjaja, H. (2014). *Titik berat otonomi pada daerah tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarna, J. (2010). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. *Journal of Rural and Development*, 3(5).